

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anonim, 2008. *Kamus Hukum*, Bandung, Citra Umbara

Ade Arif Firmansyah, 2017 *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Press.

Budi Setiyono, 2003, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Yogyakarta, Suara Merdeka.

Gaffa Affan, 2002, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Misdianti, Kartasapoetra, 1993, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, Bumi Aksara

Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muslin Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Thafa Media

Nia Kania Winayanti, 2011, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

M. Solly Lubus, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Penerbit Alumni.

Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta

Journal :

Ayu Desiana, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol 1, No 1, 2015

Catur wibowo, Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*, 15 Februari 2015

I Wayan Putra Widia Sukma, *Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati*, Vol 1 No 1 Tahun 2013

Muhammad Fadhil Nurdin, *Peran Ormas dan LSM Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2016

M. Yusuf. BA, *Peran Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2016

Nielton Caves Durado, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah*, Volume 1, No 7, Tahun 2016

Putu Indah Prameswari, *Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013*, Jurnal Politik Muda, Vol. 4, No. 1, Januari – Maret 2015

Rasyid Thaha, *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 1, 2012

Tirta Nugraha Mursitama, *Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Journal Kemenkumham, 2011

Uliana Ria Sembiring, *Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Tekno Efisiensi Jurnal Ilmiah KORPRI Kopertis Wilayah IV, Vol 1, No. 1, Tahun 2016

Website :

Ali, *UU Ormas, Riwayatmu kini*, 10 Juni 2008, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmu-kini>, di akses pada 04 November 2017, pukul 06.51.

Anonim, *Persyaratan Pendaftaran Ormas Dengan Lingkup Nasional*, <http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files/uploads>, diakses pada 03 November 2017, pukul 08.26.

Anonim, *Visi dan Misi Kesbangpol*, <http://kesbangpol.jogjaprov.go.id/page/visi-dan-misi>, diakses pada 31 Oktober 2017 pukul 07.34  
<http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global>

Skripsi :

Mery Afriska, 2017, “Pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat”,( Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung).

Undang – Undang :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.